

**FENOMENA BENTUK DAN WUJUD ARSITEKTURAL:
Antara Materialitas, Representasi dan Muatan Kehidupan Keseharian dari
Permukiman Kampung Perkotaan**

Triatno Yudo Harjoko

Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia

ABSTRAK. Pengetahuan arsitektur yang bukan fisik (kultur material), yakni artefak lingkung bangun dan keteknikannya, banyak dijelaskan melalui ide metafisik (non-material culture) hasil reka-pikir yang tidak terkait langsung dengan obyek fisik yang diamati. Ide metafisik arsitektural tidak dapat diklaim sebagai pengetahuan yang tetap. Kampung sebagai topik diskusi dalam tulisan ini akan dibahas bukan dari aspek fisik, seperti teknologi, tipologi, yang seringkali dipahami sebagai ide yang tetap dan tergeneralisasi, tetapi sebagai fenomena kehadiran bermukim sekelompok masyarakat perkotaan. Tropotopia sebagai sebuah ide untuk membahas kampung perkotaan suatu 'ada' akan mengungkap 'apa' dan 'keapaan'nya. Ide ini juga dimaksud sebagai penjelasan tandingan dari ide kampung yang ada secara umum.

Kata kunci: Kampung perkotaan, Bentuk, Wujud, dan Tropotopia

ABSTRACT. Architecture as knowledge can be conceived as material or non-material culture. Analysis on non-material culture is basically a metaphysic; it cannot be claimed as fixed knowledge. Kampung can be discussed in this sense, as a non-material culture. Its does not concern technology (techne) or even typology, but as an existence or 'being in the world' – a phenomenon of human settlement di urban settings. Tropotopia as a metaphysical idea is bring forward to analyze urban kampung conceived as a being. It will discuss urban kampung to uncover 'what' and 'whatness' of it. This analysis is also to put forward a rival paradigm against what is traditionally or generally accepted in architectural discourse.

Keywords: urban kampung, form, appearance, tropotopia

PENDAHULUAN

Banyak orang termasuk para rekan sejawat arsitek profesional mempersoalkan *bentuk* dan *solusi* rancangan arsitektur permukiman. Sebagaimana sering terjadi misalnya dalam proyek kajian yang dipesan, mereka melimpahkan opini soal permukiman yang dinilai menjadi persoalan dan meminta untuk menerima opini ini apapun otoritas yang kami miliki. Dengan ke-monoton-an yang bernada suram, pertanyaan dan opini ini hampir bergeming mendefinisikan kampung perkotaan sebagai masalah bentuk raga dan keberadaan kampung perkotaan seperti misalnya kotor, kumuh, kekerasan, tidak-patuh, ancaman kesehatan atau lingkungan, potensi konflik kelompok-kelompok di dalam kampung dan lainnya; atau pada masalah yang mencolok yakni kemiskinan, penyalur PKL, sarang perilaku menyimpang dan lain-lain. Fantasi atau mitos dalam menggambarkan kampung seperti demikian tidak menjelaskan realita atau keadaan yang sebenarnya.

Jika peneliti diijinkan untuk memberi bobot pengetahuan perancangan yang bermanfaat bagi individu atau kelompok, baik itu rekayasa maupun arsitektur, maka sepuluh persen pengetahuan akan berkaitan dengan seni, tigapuluh persen yang berkaitan dengan disiplin (rekayasa atau arsitektur), dan enam puluh persen antropologi.

Usai pemikiran-pemikiran pakar dunia akan Dunia Ketiga mengenai dwi-sosial, dwi-ekonomi, termasuk perdebatan tanpa akhir, akhirnya terjelaskan secara alamiah melalui citra masyarakat yang memberikan sebutan kota metropolitan Jakarta sebagai perkampungan besar. Bagaimana mengungkap keadaan bentuk permukiman perkotaan seperti demikian ini? (Wilden, dkk, 1968). Materialitas, representasi, atau muatan dari kehidupan itu sendiri? Menurut Deleuze ((Deleuze, 1994) yang menganalisis konsep *Difference and Repetition* memastikan bahwa materialitas, representasi merujuk pada sesuatu yang tetap (*fixed*) yang menunjukkan identitas (kesatuan kesamaan dari perbedaan), termasuk tipe.

Arsitektur sangat erat berkaitan dengan bentuk dan wujud dari lingkung bangun. Ide, yang juga berimplikasi bentuk (Lee, Desmond, 1965), adalah serapan inderawi dan rekaan dari benak manusia; idealisasi dari apa yang terserap dalam pola mental yang disebut citra oleh indera manusia. Sedangkan wujud

adalah kondisi obyektif dari apa yang diserap dan direka pikir. Fenomena bentuk/wujud ini yang menjadi kritikal dalam pembelajaran dan pemahaman arsitektur itu sendiri. Sebagian besar pandangan arsitektural bermuara pada wujud sebagai bagian dari *tec*, *tehne*, *technetikōs* – rasa/sifat seni, ketrampilan, sehingga aspek *arche*, *archetikōs* – rasa/sifat muasal, asal-usul terbenamkan. Sebagai akibat, arsitektur bias kepada komposisi, keteraturan, rekayasa dan sains; aspek peri-kehidupan manusia sirna. Situasi menjadi lebih pelik saat arsitektur menjadi bagian dari kapitalisme – produksi. Arsitektur identik dengan keindahan. Ketetapan estetika di dalam arsitektur seperti ini terkekang oleh bias norma keindahan (Douglass, 2002), keteraturan sehingga segala sesuatu yang buruk dinyatakan tak sesuai norma atau bahkan salah. Cara berpikir seperti demikian kemudian berlanjut pada dikotomi ide seperti kekotoran-kebersihan, kehinaan-kekudusan. Kekotoran tidak selalu berarti pencemaran atau berbahaya. Serial TV *Fear Factor* telah secara lugas membuktikan pandangan estetika yang keliru ini. Ide pencemaran, menurut Mary Douglas (Douglass, 2002), “terjadi di dalam kehidupan masyarakat dalam dua jenjang, kesatu yang terbesar adalah instrumental, dan kedua adalah ekspresif”.

Dalam mempelajari arsitektur permukiman terdapat kajian yang mengamati permukiman binatang; manusia kagum dengan binatang seperti semut, rayap, tawon, burung dalam membangun rumahnya. Kekaguman ini dialamatkan pada aspek wujud, *tekne*, instrumental saja yang kemudian menginspirasi teknologi bangun-membangun; nyaris pengamatan ditelusuri pada pengungkapan penciptaan – *poesis*, yakni, mengapa bentuk itu yang dibangun. Bentuk ini menjadi khas kelompok mereka, karena *mereka-sendiri* yang membangun. Manusia dan permukiman urban tidak demikian halnya, seiring pembagian kerja yang berkembang maka sebagian besar tempat bermukim ini dirancang dan dibangun bukan oleh pengguna itu sendiri melainkan melalui pengembang yang di dalam pranata sosialnya termasuk juga arsitek. Sejauh pranata sosial dari pengembang ini memahami ragam dan kompleksitas kehidupan maka produksi industrial perumahan yang seragam dapat dihindari, termasuk gagasan akan rumah-milik di wilayah perkotaan.

TROPOTOPIA

Berkaitan dengan ide metafisik tentang sesuatu yang bukan fisik obyektif, seperti dalam pengetahuan ilmu alam, maka ide metafisik seperti komposisi, teori sosial

(Marxisme), dan lain-lain adalah rekaan pikir manusia tentang obyek tetapi bukan situasi fisik obyek (*state of affairs*) dari benda yang diamati, misalnya molekul, quantum fisik dll. Oleh Derrida ide metafisik tidak mungkin pasti atau tetap, dia rentan terhadap pembongkaran atau dekonstruksi.

Tropotopia adalah ide, istilah yang peneliti ajukan untuk menggambarkan ide metafisik yang tidak pasti itu. Dalam ranah arsitektur permukiman perkotaan, secara khusus istilah ini memang ditujukan untuk menjelaskan fenomena bentuk permukiman, khususnya dalam paparan ini berkaitan dengan keberadaan kampung perkotaan. Secara umum, ide ini sebenarnya juga merujuk pada metoda berpikir itu sendiri. Ilmuwan dalam berwacana memiliki kecenderungan untuk melihat, memahami ilmuwan lain dari kacamata, bentuk, lokasi (*topos*) berpikir tertentu dari dia/mereka sendiri; dan jika tidak mampu membandingkan, melokasikan ide yang berlainan pada lokasi dia/mereka maka muncul pertentangan dan menempatkan ide berlainan ini pada lokasi tandingan atau bahkan tak-dikenal – *utopia*, *heterotopia*, *dystopia*. Istilah paradigma Thomas Kuhn (dari asal kata Yunani *deiknúnai* - *to teach or show learners something* → menurunkan kata *dictionary*) juga sering disalahartikan sebagai suatu '(kelompok) cara pandang' atau *topos* dalam kaitan seperti ini.

Tropotopia dirujuk dari dua akar kata Yunani – *tropo*, keadaan tidak kekal, selalu berubah (*tropical*, *entropy*); dan *topos*, tempat. Istilah ini merujuk pada pemahaman bentuk *liminal*, bentuk yang hadir dalam benak atau mental-pikir manusia dan hadir dalam proses mengkuualitas; dia tidak dapat dipastikan wujudnya kecuali kualitasnya (Derrida, 1995). Istilah ini juga sekaligus merujuk pada cara melihat dan memahami dari benak pengamat terhadap individu atau kelompok dalam berkegiatan, yakni pengamatan tentang sesuatu tanpa pengetahuan, praduga yang pernah pengamat pahami atau bahkan kuasai.

Secara sempit tropotopia adalah ide tentang kualitas suatu ada. Bentuk arsitektural dalam konteks ini dipahami sebagai suatu kualitas ruang yang hadir dari suatu kegiatan manusia; oleh karena itu dia hadir di luar dan sepanjang ruang keadaan yang ragawi. Memahami ruang ini – dari kegiatan individu atau kelompok – adalah memahami ide dari individu atau kelompok dalam mengoperasikan atau menggunakan ruang ragawi yang mereka kuasai (contoh, ruang di sekitar air-muncrat HI walaupun diberi pagar, ruang tersebut sering dianggap merepresentasikan ruang ekspresi diri, unjuk rasa yang paling ideal

bagi para pengunjung rasa). Ide mereka hadir sebagai suatu meta-ruang; dia ada dalam benak manusia yang tak terdefiniskan tetapi performatif, *informe*, seperti halnya para pemain catur yang mereka-pikir ruang gerak bidak-bidak di dalam mental pikir mereka. Artinya, manusia dalam bermukim dia atau mereka mengantisipasi ruang kehidupan dengan taktik dan operasinya. Dari pengamatan semacam ini dapat diungkap bahwa strategi dari perencana, perancang atau bahkan pemerintah daerah akan diantisipasi secara beragam dari tiap individu atau kelompok sesuai taktik dan operasi penggunaannya. Michele de Certeau (De Certeau, 1984) menyebut tindak ini dengan cara-cara beroperasi di dalam praktik sosial; cara ini dapat berupa representasi dan juga konsumsi.

Arsitektur permukiman perkotaan dalam pandangan demikian merujuk pada kualitas ruang daur hidup manusia, baik itu dalam lingkup keluarga yang pribadi maupun ruang publik di kawasan perkotaan. Dalam pemikiran seperti demikian maka permukiman dalam kajian arsitektur akan memusatkan perhatian pada segala hal yang menyangkut aspek budaya non-material yakni ide, pikiran, nilai dan norma dari individu maupun kelompok tentang bermukim mereka. Pada masyarakat yang kental tradisi maka ide bermukim mereka sangat terkait dapat diungkap melalui ide bermukim (*dwelling*) dari Heidegger - empat-anasir.

Menurut Martin Heidegger (Heidegger, 1971), istilah bermukim pada hakekatnya menjelaskan empat-anasir yang menyatu yang mengungkap fenomena bermukim manusia - keberadaan kehidupan manusia yang terlempar ke dunia ini (*being-in-the-world*): yakni i) ide tentang kekuatan supranatural (*divinities*); ii) ide kefanaan manusia (*mortal*); iii) langit yang memberikan kehidupan melalui terang hari, hujan dan lain-lain (*sky*), dan iv) bumi yang memberikan kemurahan akan flora dan fauna, air. Pemikiran Heidegger telah mengangkat persoalan keterdukungan (sustainability) kehidupan manusia di bumi. Kesadaran dan pemahaman akan eko-kehidupan itu baru mulai muncul setelah manusia modern mengingkari hakekat hidup di bumi ini. Modernisme telah membius manusia menjadi masyarakat yang mono-dimensional, melalui derasnya produk industri kapitalis hampir ke segala penjuru sendi kehidupan manusia. Budaya dan ideologi semacam ini mendera kehidupan manusia perkotaan dengan ideologi kesejahteraan dan kenyamanan yang terbakukan dan semu. Keragaman budaya material dan non-material nyaris sirna oleh keseragaman produk kapitalis, dan

lebih tragis akhirnya lagi masyarakat hadir sebagai masyarakat tontonan (Debord, 1967).

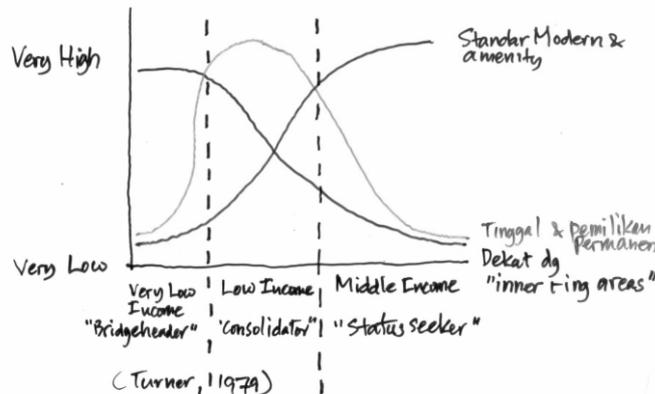
Banyak kritik ditujukan pada ide ini yang sebenarnya mereka telah keliru memahami pemikiran fundamental ini. Ide Heidegger ini dapat menjelaskan mengapa berbagai bangsa, suku memiliki tradisi yang berbeda dalam mengembangkan ide dan pola bermukim mereka mulai dari permukiman masyarakat primitif, etnis, feodal, arsitokrat dan akhirnya kapitalis. Dalam dunia kehidupan yang sangat material, 'ketakutan' manusia mortal bergeser pada pemujaan duniawi – khususnya 'uang', alam dieksploitasi untuk tujuan-tujuan material dan 'bentuk' permukiman manusia menjadi *hyper-real*.

Saat bumi tergerus oleh keserakahan manusia dan menyisakan bencana, muncul gerakan lingkungan ekstrim yang anti-urban atau melimitasi intervensi terhadap alam. Tudingan keras dialamatkan ke teknologi dan insinyur. Sebenarnya tudingan seperti ini tidak menyelesaikan persoalan permukiman manusia. Seiring perseteruan antara para pemerhati lingkungan dan para pengembang (perkotaan atau perdesaan), William McDonough dan Michael Braungart (Mc Donough dan Braungart, 2002), melalui proyek-proyek mereka dan kasus yang diamati, menghasilkan temuan bahwa limbah (kecuali yang berbahaya) itu suatu keniscayaan dari manusia bermukim. Persoalannya kemudian adalah bagaimana limbah itu terserap secara baik baik oleh alam atau oleh proses produksi lain. Mereka secara tidak langsung menjungkir-balik keyakinan para ahli-lingkungan yang eko-sentrisme. Mereka secara lugas menyatakan posisi mereka bahwa ekonomi dan teknologi adalah bagian dari keberadaan manusia. Persoalan utama adalah bagaimana dengan teknologi itu manusia mampu mendukung kehidupan planet bumi dan berbuat seperti alam di mana produksi yang menghasilkan limbah dapat menjadi makanan bagi alam atau produksi yang lain. Jadi, menurut mereka, persoalan daur-ulang bukanlah daur-turun tetapi daur-naik. Di sini tantangan bagi para ahli rekayasa untuk memperhitungkan limbah produksi dapat terserap oleh industri lain dan demikian seterusnya.

Permukiman masyarakat miskin perkotaan

John Turner pada tahun 1960-an telah mengungkap persoalan mendasar permukiman masyarakat miskin perkotaan dan menyatakan bahwa mereka

adalah pengembang sejati dan efektif. Kemudian Turner mengusulkan ide Self-Help yang mendapat kritikan tajam dari berbagai cendekiawan dunia. Namun mereka nyaris memahami ide ini, dan perdebatan bergeser pada masalah etimologi dan komoditi. Dari gagasan Turner kita dapat memahami aspirasi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tentang rumah dan bagaimana rumah ini secara layak dapat ditawarkan pada mereka. Menghadapi hidup bagi para migran miskin dari berbagai asal dari Nusantara di perkotaan layaknya maju ke medan 'peperangan', yang memerlukan taktik dan operasi. Bagi mereka bermukim (berlaku juga bagi para profesional muda yang kerap berpindah tugas atau karya) tidak identik dengan memiliki rumah tetapi merumah yang mengimplikasi proses bukan obyek.

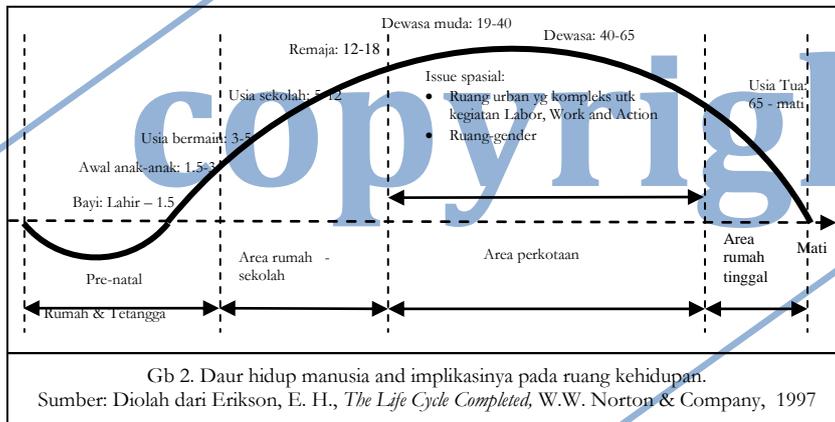


Gb 1. Sumber: Turner, J.F.C., 'Housing priorities, settlement patterns and urban development in modernizing countries, *Journal of the American Institute of Planners*. 34, 354-363

Menurut Turner, para migran miskin dari desa masuk ke kota mencari posisi strategis terdepan seperti di dalam pertempuran – *bridgehead* – dia menyebutnya kelompok ini para *bridgeheaders*, pengendap-lokasi strategis.

Lokasi dalam konteks ini adalah lokasi kesempatan kerja. Ide bermukim sama sekali bukan rumah tetapi kedekatan dengan lokasi kerja, misalnya para buruh konstruksi, pemulung dan lainnya.

Para migran perdesaan dibutuhkan oleh kota tetapi mereka luput dari perhatian politisi, perencana dan arsitek, khususnya yang terkait dengan apa dan di mana permukiman mereka. Gagasan yang berkembang adalah kebijakan dan perundangan yang kapitalistik yang berurusan dengan persoalan perbankan, pertanahan dan standard teknis rumah milik. Di sektor perencanaan tataruang, kampung nyaris 'ada' dalam rencana tata-kota; kawasan ini dianggap kotor, tidak tertib dan sulit diatur. Mereka lupa bahwa kota-kota di Indonesia sejak dahulu hingga kini berawal dari dan didukung oleh permukiman kampung.



Issues of Life-cycle Space		
Development stages	Psychosocial crises	Spatially significant relations
0. Pre-natal	Psychological development the pre-born child is inherent with psychological stimulus and environment of the mother	<u>Home</u> : the design house that sustains psychological comfort for the mother to minimize stress
1. Infancy	Basic trust versus Basic mistrust	<u>Maternal person distance</u> : space for private development of the child in the vicinity of the mother, in the house
2. Early childhood	Autonomy versus shame, doubt	<u>Parental persons' distance</u> : space for healthy relations to the child's parent in the house
3. Play age	Initiative versus guilt	<u>Basic family distance</u> : space for a suitable relations and recreation with the family in the neighborhood
4. School age	Industry versus inferiority	<u>Neighborhood – school spatial distance</u> : at this age the child has new horizon of relations, namely friends at school
5. Adolescence	Identity versus identity confusion	<u>Peer groups and Out-groups</u> ; <u>Model of leadership</u> : space fro the puberty
6. Young adulthood	Intimacy versus isolation	<u>Partners in friendship, sex, competition, cooperation</u> : spatial issues for labor (especially love), work (economic activities), and action (politics, affiliation, and, to certain case, gendered space)
7. Adulthood	Generativity versus stagnation	<u>Divided labor and shared household</u> : space for household care, work and action.
8. Old age	Integrity versus despair	<u>'Mankind' or 'My kind'</u> : space for strengthening wisdom
Sumber: Diolah dari Erikson's Chart of Development Stages, Erikson, E. H., <i>The Life Cycle Completed</i> , W.W. Norton & Company, 1997, p. 34-35		

Perbaikan kampung pernah dikembangkan, namun pendekatan masih berorientasi fisik, infrastruktur, yakni jalan akses utama saja. Pengendalian gunalahan tidak dikembangkan untuk menyeimbangkan ruang daur hidup penghuni kampung sehingga berakhir tragedi.

Rumah menurut Turner bukan 'rumah seperti apa' tetapi 'bagaimana rumah itu mendukung kehidupan manusia'. Rumah milik bagi para migran perdesaan bukan prioritas utama. Sangat ironis jika kebijakan pemerintah mengesai perumahan masih berorientasi pada rumah milik. Nyaris kebijakan dan program yang diprioritaskan pada rumah sewa atau bahkan perumahan sosial (*social housing*). Apakah gagasan membangun 1000 menara perumahan menyelesaikan persoalan bermukim di kota?

Ruang Daur Hidup dan Kondisi Hidup

Permukiman berurusan dengan ruang daur hidup manusia. Untuk menjelaskan ide ini, saya meminjam ide pakar psikologi Erik. H. Erikson (Erikson, 1997), yakni mengenai siklus tahapan perkembangan psikologi manusia secara utuh sesuai dengan perkembangan usia dan lingkung kehidupannya. Siklus ini tidak dapat dibalik atau dimundurkan. Manusia dikonsepsi, lahir dan akhirnya mati.

Berkaitan dengan arsitektur permukiman ide ini sangat membantu menjelaskan ruang-ruang yang sangat diperlukan bagi perkembangan dan pertumbuhan raga dan jiwa (*kerja, labor*) manusia dari tahap usia dini dalam kandungan, anak-anak, dewasa hingga usia tua yang kemudian mati. Misalnya, tahap kritisal, ibu yang sedang mengandung membutuhkan lingkungan bermukim yang layak untuk kesehatan raga maupun jiwa.

Ruang daur hidup berawal dari rumah, kemudian meluas ke komunitas di sekitar rumah, ke kota, kembali lagi ke rumah saat usia tua, dan akhirnya ruang pemakaman sebagai bagian pamungkas dari permukiman manusia. Ruang daur hidup ini mengakomodasi seluruh kegiatan manusia menurut tahapan usia agar mereka dapat menelusuri tahapan usia secara layak. Namun kesejahteraan raga/jiwa, ekonomi, dan sosial hanya dapat diungkap dan dijelaskan melalui kegiatan-kegiatan manusia itu sendiri.

Menurut Hannah Arendt (Arendt, 1958), kesejahteraan manusia ditentukan oleh kondisi atau kegiatan triadik mendasar, yakni, i) kegiatan kerja (*labor*) yang merupakan fitrah dari keberadaan manusia di dunia, kegiatan kerja adalah sama bagi setiap individu yang terlahir ke dunia; ii) kegiatan karya (*work*) merupakan anugerah manusia sebagai *homo faber* – karya tangan manusia yang dapat

diberikan oleh kerja tubuh manusia. Tidak seperti kondisi kerja, kondisi karya bukan fitrah dan tidak berdaur sama dari satu individu ke lainnya. Sebagai fabrikator manusia menghasilkan produk untuk dikonsumsi sendiri maupun dipertukarkan. Puncak dari kegiatan karya bermuara di pasar; iii) kegiatan tindak (*action*). Tindak menurut Arendt adalah kegiatan utama yang berlangsung antar manusia tanpa perantara sesuatu atau kebendaan. Kondisi ini sesuai dengan kondisi pluralitas manusia sosial, yakni, kondisi kehidupan politik. Kondisi ini sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil mereka.

Mensejahterakan masyarakat miskin perkotaan berarti mensejahterakan ketiga kondisi mendasar tersebut akan keberadaan mereka di dunia ini. Penanganan setengah hati pada ketiga aspek kondisi manusia tidak dapat memberi dampak yang nyata terhadap keberadaan mereka di kota. Artinya, masyarakat ini memang harus dibantu, agar kinerja raga dan jiwa dapat mendorong kemampuan berkarya, dan berkehidupan sosial-politik.

KAMPUNG PERKOTAAN SEBAGAI PEMBENTUK CITRA

Tropotopia adalah wadah yang memungkinkan terjadinya 'ada'. Dia adalah 'ibu' yang melahirkan, merawat dan memberi asal-usul dan akhirnya citra.

Tropotopia Asal-usul

Kampung apakah itu perkotaan atau perdesaan dalam konteks di sini menyangkut wadah asal-usul. Dia merupakan salah satu lokus yang mengawali peradaban dan kondisi bermukim manusia. Dia juga memegang peranan yang teringkari dalam melahirkan kehadiran kota – bentuk kota. Sebagai pemeran asal-usul, dia mengusung makna sosial, kultural dan keterhubungan, sampai akhirnya, dia sirna atau berubah menjadi nama yang berbeda akibat penggusuran atau konversi lahan. Sebagai asal dia melahirkan nilai-nilai dan normanya sendiri. – ragam pandang-jagad dari ragam etnisitas Nusantara.

Berkenaan dengan kondisi kerja, khususnya budaya dan pengetahuan, manusia di dalam keasal-mulaan memiliki pandang-jagad masing-masing, suatu pandangan yang membentuk asosiasi dan kondisi manusia. Di dalam bentuk paling awal, hubungan manusia dapat dirujuk sebagai hubungan *gemeinschaftlich*. Hubungan ini dicirikan antara lain oleh imobilitas populasi, dan

pumpunan yang jelas dari keyakinan yang didukung kerabat dan religi, dan hubungan yang kooperatif. Masyarakat tribal atau bazaar antara lain dapat dijelaskan dengan konsep ini. Masyarakat kampung perkotaan merupakan kalkulus kebhinnekaan suku bangsa di Nusantara ini, termasuk pandang-jagad tradisional yang masih lekat dengan mereka.

Kondisi karya dari dari kampung perkotaan yang masih 'asli' hampir mirip dengan kampung tradisional. Kondisi ini dicirikan oleh masyarakat yang berkarya, memfabrikasi dan membangun dunia yang dihuni oleh mereka sendiri. Masyarakat kampung adalah fabrikator yang memfabrikasi bahan menjadi obyek duniawi. Berbeda dengan tuntutan masyarakat 'modern' perkotaan yang lebih mensyaratkan karya intelektual.

Tindak manusia yang sama sekali tak-tergantungan orang lain hampir tidak hadir di kampung tradisional. Kerja sebagian besar terbatas pada asosiasi alamiah yang pusatnya adalah rumah dan keluarga, di dalam komunitas non-politikal. Tanda dari kegiatan tindak seperti pasar adalah bukan tempat pertemuan warga-kota, tetapi tempat pemasaran di mana pedagang dan pengrajin dan wanita dapat unjuk diri dan tukar-menukar produk mereka. Tempat ini merupakan susunan warung yang mencirikan forum dan masyarakat bazaar.

Dalam kasus penelitian saya di kampung Penggilingan, seperti Ali (usaha membuat sepatu) dan Yan (usaha jahit-menjahit), meskipun antara mereka ada perbedaan pendidikan dan kemajuan, keduanya masuk ke dalam masyarakat kapitalis kecil (*petty capitalistic society*). Mereka terlibat dalam produksi kecil manufaktur dan memproduksi secara eksklusif untuk pasar kapitalistik. Mereka memproduksi obyek untuk pertukaran ketimbang obyek untuk digunakan sendiri. Mereka mempunyai peluang untuk masuk ke dunia dan ruang publik kota di luar dunia kampung.

Kampung perkotaan adalah 'wadah' atau tropotopia asal-usul. Dia menghantar dan mengusung berbagai jenis dan ciri manusia, khususnya yang berasal dari perdesaan. Migran baru dari desa akan berbeda dalam adaptasi mereka di Jakarta dari mereka yang telah mapan dalam waktu lama. Proses pemelajaran migran perdesaan mengenai lingkungan kota menjadi aspek penting dari kehidupan Jakarta.

Tropotopia Pengasuh

Kampung juga merupakan pengasuh. Dia seperti layaknya ibu membesarkan, merawat kehidupan manusia dengan, membuka pintu, mengizinkan manusia tumbuh, mengeksplorasi dan mengubah sumberdaya lingkung kampung. Dia merupakan tempat di mana manusia memasuki 'kedewasaan' mereka ke dalam masyarakat perkotaan – bukan masyarakat desa tetapi juga bukan masyarakat kota (*sivitas*, *citizen* – menurut pengamatan saya ide kewargaan-kota di Indonesia masih semu dibanding ide ini yang memang berkembang di negara Barat). Di dalam 'membesarkan' orang-orang, orang-orang ini menyemai diri mereka sendiri menjadi 'penghuni perkotaan' berdasarkan tradisi yang mereka bawa dari desa.

Beragam fragmen asosiasi manusia mengksontitusikan tribalisme baru di kota: formasi sosial yang tidak berbasis pada tindak sosial dari ikatan-komunitas (*Vergemeinschaftung*) tetapi tindak sosial asosiasional (*Vergesseleschaftung*). *Vergemeinschaftung* merujuk pada tindak komunal berbasisatas rasa subyektifdari kelompok-kelompok, baik ituafektualatau tradisional, bahwa mereka ada bersama. *Vergesseleschaftung* merujuk pada tipe hubungan asosiatif berbasis pada kesepakatan rasional melalui persetujuan bersama atau melalui kesepakatan pikir yang kontraktual.(Weber, 1947).

Beberapa penduduk mungkin memperoleh hak kewargaan mereka, berbasis kontrak (perundangan, dsb.), di dalam layaknya masyarakat perkotaan di mana melalui kontrak ini mereka dapat menyampaikan aspirasi politik mereka di dalam lembaga formal. Penduduk lainnya, seakan hanya ditelantarkan karena keberadaan kampung kota yang 'samar', tidak diterima secara sepenuh hati oleh politisi, perencana, dan perancang perkotaan. Kelompok ini berbasis tidak pada hubungan komunal atau asosiatif, tetapi, misalnya, pada 'tribalisme baru' yang berbasis pada pengaruh kuasa para patron yang ada, khususnya preman perkotaan.

Orang-orang perkotaan tumbuh melalui apa saja agar mereka dapat tetap hidup dan secara sosial 'dapat diterima'. Di dalam masyarakat multi-kultur, di mana terdapat kelangkaan norma-norma yang dibentuk bersama, kota akan tumbuh sebagaimana dia berjalan. Kompetisi antar individual banyak yang digelar di 'jalan'. Masyarakat seperti ini menjadi 'masyarakat jalanan', ekonomi 'jalanan'

dengan politik 'jalanan'. Pada banyak kasus, seperti terjadi akhir-akhir ini, pertikaian antar kampung terjadi sebagian karena anomie seperti di atas. Individu berubah menjadi 'tak-beradab', 'liar', dan 'secara politik tidak-patuh'.

Tropotopia Penampung

Kampung adalah penampung. Suatu penampung yang dapat direka-pikir sebagai 'kehampaan' atau 'kekosongan'. Karena bermanfaat, dia menjaga, mengakomodasi, dan memasukkan semua 'ada' (*beings*) di dalamnya. Di dalam proses urbanisasi, kampung berkembang di dalam formasi suatu kota. Dia telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberi rupa pada kota. Sebagai penampung dia dipengaruhi oleh pengetahuan, atau pandang-jagad dari individu-individu atau kelompok yang memaanfaatkannya. Kelompok populasi perkotaan yang berbeda memandang dan menggunakan kampung sebagai lokal yang berbeda di dalam bentang perkotaan. Pengrusakan yang menerus di bentang alam kampung perkotaan dipastikan melalui ketidak-tahuan dari populasi perkotaan secara keseluruhan.

Pemanfaatan kampung dalam proses urbanisasi, selain tidak ada lahan lain, juga akibat potensialitasnya untuk berhimpun dengan kegiatan perkotaan. Prinsip ekonomi pengembalian atau keuntungan dari lokalitas di kampung menjadikan lokal ini sebagai bagian penting dari kapital yang memungkinkan proses urbanisasi.

Dalam pengertian 'kehampaan' penampung, migran perdesaan diterima dan diijinkan untuk berkembang dan berubah menjadi urban melalui berbagai moda transformasi yang khas pada kampung tersebut. Kampung dalam proses seperti dapat memberi ciri masing-masing yang dapat kemudian berganti ciri sesuai perubahan muatan yang diterimanya (misalnya, kampung sepatu, perabot dll.)

Bagi pengembang swasta, kampung adalah satu-satunya lokasi dan lahan yang dapat dikembangkan menjadi pengembangan permukiman baru yang dari segi lingkungan sehat dan menguntungkan. Namun, penyediaannya bukan untuk para penghuni yang ada atau yang akan datang. Proses ini mengakibatkan serta meningkatkan pemagaran sosial yang telah berkembang akibat proses densifikasi. Pengembangan ini tidak menyertakan fasilitas bersama seperti jalan, dan membuat frustrasi aksesibilitas ke kampung. Ketika real estat berkembang

meluas, akhirnya dia hanya akan menggusur secara keseluruhan populasi kampung ke luar dari kawasan. Selama kampung adalah bagian dari proses urbanisasi maka penggusuran kampung hanya menunggu 'kampung baru' muncul di lokasi terlarang dengan cara usurpasi atau penyerobotan.

Sebagai penampung, kampung mengalami metaformosis dari kampung perdesaan tradisional ke kampung perkotaan. Penampung ini menerima jenis 'pengisian' apa saja, mulai dari pengembangan individual rumah-rumah tradisional dan modern, hingga pengembangan swasta kapitalistik berskala besar.

'Kehampaan' penampung menjadi 'kasunyatan' dalam materialitas. Kebendaan ini hanyalah pelayan dari 'kehampaan' di mana ruang di dalam penampung menjadi lebih hakiki ketimbang benda itu sendiri.

Tropotopia Pemberi Cap

Kampung adalah pemberi cap. Suatu cap dapat dipahami sebagai suatu citra, yang dibangun sebagai hasil dari pengalaman masa lalu dari pemilik citra, atau suatu tempat kenangan kolektif (Boulding, 1956). Dalam kaitan ini, migran perdesaan dari berbagai etnisitas diikat untuk mencerap kampung perkotaan dalam arti citra, nilai yang berbeda ketimbang citra dari penduduk perkotaan yang secara nisbi lebih-sejahtera.

Dalam pengertian yang kasat-mata, suatu cap memberikan ciri, kualitas, jenis, properti, dan konstitusi. Kualitas inilah yang dapat meraga dan dapat diukur dalam dimensi ruang-waktu. Nama atau tanda dari kampung dapat ditemu-kenali secara jelas melalui pertumbuhan ragawinya. Morfologi kampung di kota dapat ditemu-kenali sebagai amorf. Dia menyerupai bentuk biologis, yang dicirikan oleh proses organik alamiah dari pertumbuhan. Waddington (1968) menyatakan bahwa bentuk organik merupakan hasil dari interaksi berbagai kekuatan. Di dalam mahluk hidup, keseluruhan bentuk menunjukkan bahwa resultannya selalu dalam status ekuilibrium. Dengan kata lain, polanya dapat ditemu-kenali karena pola ini selalu dalam keadaan seimbang di mana kekuatan negatif dicegah oleh kekuatan positif atau sebaliknya.

Sebaliknya, formasi organik kampung akan secara tak henti-hentinya tumbuh dan berkembang sampai dia berakhir sendiri, yang disebabkan oleh ketidak-mampuannya untuk mendukung perluasan terus menerus. Di dalam penampakkannya belaka, kampung dapat secara mudah diamati sebagai tempat yang mengkhawatirkan, atau menakutkan bagi beberapa pengamat, suatu tempat dari kemiskinan dan kejahatan, sementara bagi lainnya kampung dapat dilihat sebagai tempat peluang, atau bahkan rejeki, suatu tempat multi-etnis dari masyarakat Indonesia.

Kampung dalam pengertian merupakan citra paradoks, di mana masyarakat 'modern' memilih pengembangan kembali atau baru sedangkan si miskin memilih kesinambungan. Keduanya memiliki ide dan tradisi yang berseberangan akan apa yang harus dilakukan soal kampung yang ada. Paradoks ini tidak dimaksudkan untuk meletakkan 'modern' berlawanan dengan masyarakat kampung sebagai 'tradisional'. Semua penghuni kampung adalah penghuni perkotaan termasuk mereka yang kaya maupun miskin. Si miskin cenderung memandang kampung sebagai satu-satunya lokalitas yang memberikan asa agar tetap hidup di kota.

Pada pemapasan jarak dekat dengan permukiman kampung, jejak kampung dapat ditemukeni melalui ungkapan arsitektur kampung perkotaan. Di sana-sini, dijumpai rumah-rumah orang berada, khususnya di sepanjang jalan utama di kampung. Secara umum, masyarakat berpenghasilan rendah sebagian besar membangun rumah mereka dengan bahan murah atau daur-ulang. Namun demikian, suatu kampung, yakni di tepi kali Code Yogyakarta, dapat mewujudkan arsitektur perkotaan dengan nilai baku tinggi, seperti yang dikembangkan secara suka rela oleh almarhum arsitek Romo Manguwijaya untuk membantu mereka yang miskin.

Tropotopia yang merujuk pada suatu tempat bukan milik atau berada pada suatu perioda sejarah. Ide ini mencakupi suatu ruang atau kontinum makna serta entitas formal seperti lokalitas. Ide ini berada di luar kepastian baik itu makna dan aktualitas. Jakarta tak dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Jakarta merupakan panutan bagi pot peleburan budaya Nusantara, sedangkan yang lain masih didominasi oleh kelompok etnis tertentu. Bahasa Jakarte telah mampu tampil setara dengan bahasa Indonesia di dalam menyatukan cara komunikasi kawula muda.

Kampung perkotaan secara ragawi 'serupa' morfologinya, namun kualitas muatan berbeda-beda. Artinya, pengamat dapat terpedaya oleh kesan ragawi sehingga cenderung menetak estetika kampung sebagai kotor dan buruk – kumuh. Kecenderungan epistemik ini akan semakin parah jika pengetahuan/kuasa melembaga dalam ideologi kapitalisme.

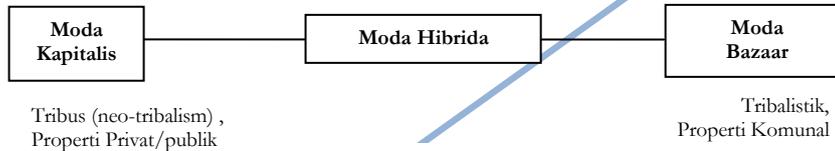
TRAGEDI PERKOTAAN DI INDONESIA

Perkembangan perkotaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konstitusi dan strukturasi masyarakat yang kompleks dari tribal sampai dengan masyarakat kapitalis. Berbeda dengan masyarakat di negara belahan Barat yang relatif homogen apakah itu kapitalis atau sosialis. Di Indonesia kompleksitas masyarakat terbentang di dalam kontinum dari ekstrimitas kondisi manusia yang sangat besar ketimpangannya. Kompleksitas demikian tidak dijawantahkan dalam tatakelola perkotaan yang layak dan akhirnya berdampak pada ketimpangan serta ketidak-adilan formasi perkotaan. Kota secara keseluruhan berkembang ke arah negatif.

Tragedi Ekonomi Perkotaan

Tragedi perkotaan terjadi jika sebagian besar populasinya hidup dalam kemiskinan. Sejak tesis dwi-sosial dan dwi-ekonomi yang diajukan oleh J. H. Boeke tahun 1953 di dunia Barat, dalam buku *Economics and Economic Policy of Dual Society*, perdebatan moda dwi-sosial dan dwi-ekonomi terus berlanjut. Boeke mengembangkan ide ini melalui kajian-kajian yang ada sebelumnya dari tahun 1910 yang banyak diilhami oleh beberapa cendekiawan India. Tesis Boeke ini mengambil kasus di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Namun demikian, sayangnya, sebagian besar pakar ekonomi dan sosial negara berkembang tidak serius menekuni fenomena akut ini. Boeke pada saat itu mengamati bahwa teori ekonomi Barat tidak layak diterapkan secara sepihak mengingat masyarakat dan ekonomi di Indonesia terkonstitusikan dalam dua kutub kota dan desa, kapitalis dan bazaar atau terdapat istilah lain yang juga merujuk pada kondisi dualitas ini seperti formal/informal. Saya cenderung memilih istilah kontinum kapitalis-bazaar, karena lebih memadai untuk menjelaskan masalah sosial-ekonomi; dan sebenarnya yang penting diungkap adalah bahwa di antara ke dua kutub terjadi transformasi bertahap dari moda

bazaar ke arah moda kapitalis. Dalam konteks ini ekonomi bukan lagi fenomena yang ter-'indeks'-kan, seperti layaknya 'mekanika' dari hubungan produksi, konsumsi dan distribusi yang mengabaikan 'aktor' yang terlibat.



Gb 3. Kontinuum Konstitusi dan Moda Sosial/Ekonomi di Indonesia

Pengetahuan perkotaan dan wilayah sangat didominasi oleh teori Barat dengan kondisi geografis yang berbeda, yakni benua jika dibanding dengan negara Indonesia yang kepulauan. Teori pertumbuhan, khususnya efek-mengganda dan efek-tetesan ke bawah, yang pada dasarnya berbasis pada ideologi kapitalis secara konseptual sudah tidak relevan dengan formasi geografis selain kondisi dwi-sosial masyarakatnya.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan dua kutub ekonomi dan masyarakat berkompetisi atas lahan perkotaan yang terbatas. Sementara moda kapitalis diakomodasi dalam setiap perencanaan pembangunan, moda bazaar nyaris terumuskan ruang daur hidupnya. Secara spasial, ekonomi dan masyarakat bazaar semakin terpinggirkan dan akhirnya memberi dampak negatif seperti tindak usurpasi – mengokupasi lahan tak terkontrol untuk ruang daur hidup mereka.

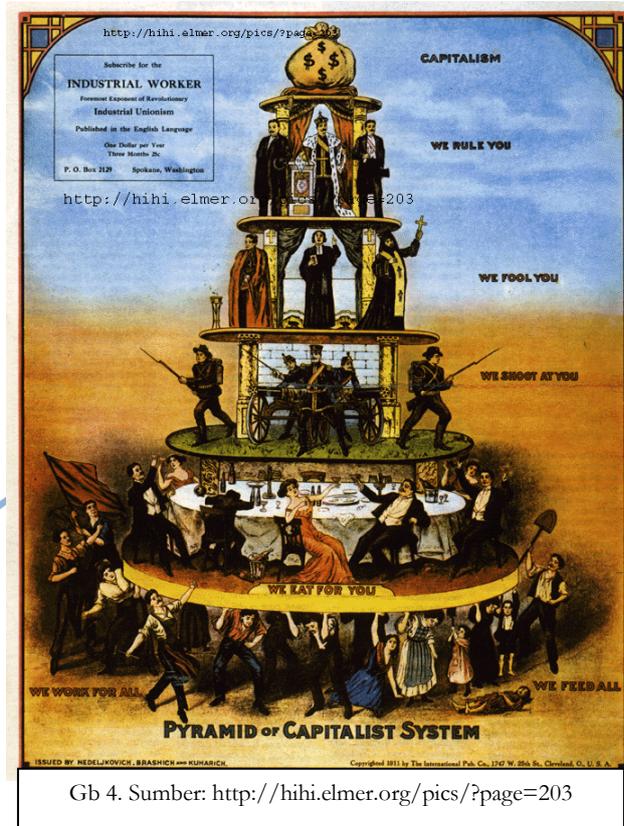
Gejala pertumbuhan *hyper-market* semakin marak di perkotaan juga semakin mengancam pangsa pasar konvensional itu sendiri, apalagi pasar tradisional ekonomi bazaar yang secara spasial sudah lebih dahulu terancam. Perbedaannya adalah jika kapitalisme menentukan 'ruang' pasarnya dengan gagasan semacam *one-stop shopping*, maka ekonomi bazaar yang terbentuk dari vektor-vektor kegiatan yang saling meniadakan mengusurpasi (jemput-bola?) lokasi strategis dimana pergerakan manusia bertemu atau berhenti dalam satu persilangan yang strategis.

Di pihak lain, pengembangan properti yang kapitalistik semakin jauh dari kasunyatan budaya Indonesia. Hal ini menyuburkan permukiman dan perumahan perkotaan yang *hiper-real* melalui teknologi komunikasi yang memikat dan memuat impian-impian (*simulakra*) yang tidak merujuk pada kondisi budaya yang berkembang di Nusantara.

Kelangkaan Sektor Publik dan Tragedi Kota

Di masyarakat Barat sejarah perkembangan kota hingga seperti sekarang ini terkait dengan perubahan konstitusi kemasyarakatannya. *Polis* dan *bios politikos* (kehidupan polis) di Yunani sangat berbeda dengan *Civic*, *civitas* dan *societas* di Romawi. Yunani tidak mengenal 'kewargaan' polis. Individu di luar polis berada di dalam komunitas keluarga yang sangat despotik (termasuk di dalamnya budak). Setelah era Yunani dan Romawi, yang sangat penting di utarakan di sini adalah bangkitnya sosial di Barat di dalam permukiman yang disebut kota. Artinya, muncul dua dunia masyarakat – privat dan publik. Peran sektor publik ini menjadi sangat dominan setelah para *burgher* menjadi maju secara pengetahuan dan ekonomi. Kota tempat mereka bermukim tidak dapat lagi secara sepihak dikendalikan secara privat oleh para bangsawan atau tuan tanah. Mereka menuntut secara politik akan kepentingan publik dan agar kota berfungsi efektif harus dikelola oleh sektor publik. Sektor publik berkembang karena sistem perpajakan yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Penguasa kota sejak itu merupakan bagian dari sektor publik hingga kini.

Di Indonesia, situasi politik sangat berbeda, diawali dari negara-kota (kerajaan), kemudian era penjajahan dan akhirnya era kemerdekaan. Secara historis sektor publik nyaris ada. Warisan sejarah ini terus berlanjut hingga pasca penjajahan. Negara secara politik muncul tidak ubahnya seperti kerajaan, merencanakan dan mengatur sumberdaya secara eksklusif dengan implikasi bahwa kendali pemanfaatan sumberdaya juga tidak dapat langsung diminta akuntabilitas oleh 'rakyat' pembayar pajak. Sektor publik hanyalah retorika. Kota merupakan refleksi dari struktur kekuasaan yang terpusat dan lebih menguntungkan swasta-kapitalis. Pengembangan fasilitas publik tidak merefleksi ruang daur hidup. Infrastruktur lebih parah lagi – tambal-sulam, *ad hocism*. Kota berkembang sporadis menciptakan sesatan atau labyrinth yang tidak terkoneksi secara layak. Kondisi demikian diperparah dengan kultur primordial, komunal.



Gb 4. Sumber: <http://hihi.elmer.org/pics/?page=203>

Tradisi Kepemilikan Komunal di Kawasan Perkotaan

Gareth Hardin dalam tulisannya *The Tragedy of the Commons* tahun 1968, menyatakan bahwa *tragedy of the commons* akibat hubungan struktural antara akses bebas ke, dan permintaan tak-terbatas akan sumberdaya terbatas dan kepemilikan komunal, merupakan jenis jebakan sosial. Terdapat dua paradoks: segi positif kepemilikan komunal yang memungkinkan setiap anggota komunitas memiliki akses sama untuk memaksimalkan sumberdaya yang terbatas; dan segi

negatif dari pemanfaatan yang tak terbatas akan berakhir tragedi. Dalam tradisi masyarakat yang kuat dalam menjaga pengelolaan sumber daya dan jumlah populasi komunitas, tragedi demikian tidak terjadi.

Permukiman kampung perkotaan – sebagai jenis kepemilikan lahan secara komunal merupakan fakta yang aktual bagaimana tragedi terjadi perkotaan di Jakarta (padat, banjir, penyakit dll). Kampung dalam konteks ini dapat dikategorikan pemilikan ‘privat’ komunal. Perencanaan tata ruang khususnya untuk kepentingan publik selalu terkendala oleh pola kepemilikan semacam ini. Situasi demikian diperburuk oleh apresiasi politisi, perencana, perancang di mana di dalam benak mereka kampung ‘tidak’ pernah dianggap ‘ada’ yang berakibat perkembangan kawasan ini menjadi spontan, tak-terkendali.

Kecenderungan konstitusi masyarakat perkotaan di Indonesia yang tribalistik, komunal menyimpang dari semangat *civitas, societas* seperti layak kota-kota di negara Barat. Hal ini akan menenggelamkan kota sebagai lokus berkembangnya masyarakat *civicus*, yang berbasis kontrak sosial dan berorientasi publik. Wacana masyarakat madani atau *civil society* seakan muncul di benak akademisi bukan dari masyarakat perkotaan.

Kota yang mengusung makna *civitas* tidak memberi kesempatan pada kemunculan dan bersemainya tribus. Pemerintah (yang tidak sama maknanya dengan *government*) yang diusung dari semangat publik akan secara alamiah memberi peluang politik yang setara dalam konstitusi dwi-sosial dari populasi kota. Artinya, kepentingan publik yang dipertaruhkan dan diperjuangkan di dalam arena politik akan menjadi bagian dari kota madani.

Pemahaman permukiman perkotaan dalam masyarakat dwi-sosial meminta pengamat untuk memahami bagaimana ruang daur hidup yang terjadi ini dikembangkan atau diproduksi secara sosial (Henri Lefebvre). Masalah perumahan perkotaan bagi masyarakat miskin tidak dapat diselesaikan dengan membangun seribu menara rumah susun seperti dicanangkan oleh wakil presiden Republik Indonesia.

PENUTUP

Dunia pendidikan arsitektur di Indonesia kini tidak lagi terbatas pada hal teknis dan seni. Arsitektur mencakup wacana ruang lingkung-bangun manusia. Ketentuan kurikulum tidak lagi mengikat bagi program pendidikan dan telah memberikan tawaran dan pilihan yang lebih terbuka bagi mahasiswa. Masing-masing universitas dapat mengembangkan program pendidikan arsitektur yang menawarkan gelar sarjana akademik atau gelar sarjana profesional. Keduanya sama-sama diperlukan oleh bangsa kita yang sedang membangun. Bangsa Indonesia masih membutuhkan banyak cendekiawan maupun profesional. Permukiman dan perumahan perkotaan merupakan persoalan yang pelik dan menantang para cendekiawan dan profesional untuk terus menggali jawaban.

Permukiman dan perumahan perkotaan memang tidak diberikan secara khusus di jenjang S1, namun masuk dalam lingkup riset masalah perkotaan yang terkait dengan proyek perancangan di studio. Bidang pengetahuan ini lebih sesuai ditawarkan dalam program pascasarjana untuk lebih membuka inovasi pengetahuan lebih jauh. Indonesia memiliki kekayaan etnis Nusantara yang perlu terus-menerus dijelajah dan digali khasanah budaya bangsanya. Kita harus kritis terhadap pandangan Orientalisme Barat. Tao mengatakan “orang cerdas pandai memahami orang lain, orang yang tercerahkan memahami diri mereka sendiri”. Persoalan permukiman perkotaan di negara berkembang dan khususnya Indonesia tidak cukup dijelaskan dari aspek materialitas, instrumental, terlebih lagi yang terkungkung dalam penjelasan positif, logikal yakni salah atau benar. Permukiman perkotaan meminta pemahaman moral, normatif.

Bagi para mahasiswa arsitektur, tetap kritis dalam penjelajahan pengetahuan di dalam kekayaan khasanah budaya dan arsitektur permukiman perkotaan di Nusantara ini khususnya terhadap dasarnya pengetahuan dari Barat – hiper-realitas dan tubuh tanpa organ (Deleuzean) dari kapitalisme. Belajar dan berpikir secara lateral atau spiral seperti ‘baling-baling helikopter’ untuk membebaskan diri dari cengkeraman cara berpikir yang linier dan sekuensial. Arsitektur secara material adalah wadah dari terjadinya ‘ada’. Berpikir melulu aspek raga tidak akan mampu mengungkap pertanyaan mendasar tentang apa itu ada dan kehadiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Wilden, A. Baltimore. (1968). **The Language of the Self**. Terjemahan. London: The John Hopkins University Press.
- Deleuze, G. (1994). **Difference and Repetition**. Columbia University Press.
- Lee, Desmond. (1965). Penguin Books. Joëlle Proust. (1989). **Questions of Form: Logic and the Analytic Proposition from Kant to Carnap**. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Douglass, M. (2002). **Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo**. Routledge,
- Derrida, J. (1995). **On the Name**. diedit oleh Thomas Dutoit Stanford University Press.
- De Certeau M. (1984). **The Practice of Everyday Life**. California: Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Heidegger, M. (1971). **Poetry, Language, Thought**. New York: Harper & Row, Publishing Inc.
- Guy Debord. (1967). **Society of the Spectacle**.
- McDonough, W. dan Michael Braungart. (2002). **Cradle to Cradle: Remaking the Way We make Things**. New York: North Point Press.
- Erikson, E.H. (1997). **The Life Cycle Completed**, W.W. Norton & Company.
- Arendt, H. (1958). **The Human Condition**. Chicago and London: The University of Chicago Press. Especially Chapter I.
- Weber, M. (1947). **The Theory of Social and Economic Organisation**. trans. A.M. Henderson and Talcott Parsons, New York: The Free Press; London: Collier-Macmillan. pp. 136-9
- Boulding, K.E. (1956). **The Image**. Ann Arbor: The University of Michigan Press. p. 6. dan juga M.C. Boyer. (1994). **The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments**. Cambridge, Mass.; London, England: The MIT Press.
- Waddington, C.H. (1968). 'The Character of Biological Form', in Whyte, L.L., **Aspects of Form**, Lund Humphries. 43-56, p. 46



copyright